

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sampah menjadi salah satu sektor penghasil gas rumah kaca yang tidak hanya menjadi masalah estetika, namun juga berdampak pada kualitas lingkungan. Pembakaran sampah yang tidak terkendali, pembuangan sampah yang sembarangan, pengelolaan sampah yang tidak memadai dan kurangnya kegiatan daur ulang menjadi faktor utama penurunan kualitas lingkungan (CNN Indonesia, 2022). Menurut laporan Bank Dunia dalam *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023*, pada tahun 2020 Indonesia menghasilkan sekitar 62,2 juta ton sampah, menjadikannya sebagai salah satu dari lima negara terbesar penyumbang sampah di dunia (Ahdiat, 2023). Timbulan sampah nasional terus meningkat, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan bahwa Indonesia akan menghasilkan sekitar 69,2 juta ton sampah pada tahun 2022, yang sebagian besar berasal dari rumah tangga. Dari total sampah tersebut, sekitar 19,8 juta ton merupakan sampah plastik dan kertas yang belum dipilah, sedangkan 35,48 persennya masih belum terolah dengan baik (Primantoro, 2023).

Pertumbuhan penduduk juga meningkatkan timbulan sampah, khususnya sampah plastik. Menurut Survei Populasi Dunia, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 275,5 juta jiwa pada November 2022, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di antara negara-negara G20 (Annur, 2022). Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah penduduk Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Sensus penduduk tahun 2020 yang

dilakukan pada tahun 2021 menyebutkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa, meningkat 32,56 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. sensus 2010 (kompas.com, 2021).

Kualitas pembangunan lingkungan hidup di dunia, termasuk Indonesia, sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat terhadap lingkungan sekitar (Mersal, 2018; Liu et al. 2022; Li, 2021). Salah satu faktor yang mempunyai dampak terbesar terhadap lingkungan adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan, meningkatkan produksi sampah. Hingga saat ini, kehidupan kota terus menjadi daya tarik bagi para pendatang (Han et al. 2020; Adzawla et al., 2019). Meningkatnya permasalahan sampah di berbagai kota di Indonesia tidak lepas dari urbanisasi yang cukup besar yang tidak diimbangi dengan jumlah tempat pembuangan sampah yang memadai, sehingga berdampak tidak hanya pada permasalahan kesehatan, namun juga pencemaran lingkungan seperti sedimentasi pada perairan. tubuh (Cahyono dkk., 2021). Selain itu, menurut Dunggio dan Ichsan (2022), pencemaran akibat kegiatan industri dapat mengakibatkan menurunnya status daerah aliran sungai (DAS).

Pengelolaan sampah yang buruk biasanya disebabkan oleh pengelolaan sampah yang buruk. Pengelolaan sampah meliputi perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pemantauan. Hal ini memerlukan kesadaran dan komitmen bersama untuk mengubah sikap, perilaku dan etika serta budaya lingkungan. Paradigma pengelolaan sampah dapat diubah dengan: (1) mengurangi jumlah sampah pada sumbernya melalui seleksi atau pengolahan dengan teknik sederhana seperti pengomposan domestik atau

lingkungan. (2) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dikoordinasikan oleh community self-help groups (CSHG), tugas kelompok ini adalah mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan lingkungan (Basriyant, 2017).

Sampah mengancam keberlanjutan kehidupan perkotaan. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah sampah padat yang dihasilkan saat ini di kawasan perkotaan di seluruh dunia rata-rata 2,01 miliar ton per tahun. Dengan asumsi 68 hingga 75 persen populasi dunia akan tinggal di perkotaan di masa depan, maka timbulan sampah di perkotaan kemungkinan akan terus meningkat. Tanpa upaya serius untuk mengendalikan konsumsi dan pengelolaan sampah, sampah akan menjadi masalah besar di perkotaan di seluruh dunia (Cao et al, 2017, Chen, 2018).

Permasalahan sampah yang dihadapi Indonesia secara nyata berkaitan dengan beberapa target Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Kerangka Kerja Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Pertama, permasalahan ini terkait dengan Target 11.6 yang menekankan pentingnya pengurangan dampak negatif lingkungan perkotaan, termasuk melalui manajemen limbah yang efisien. Produksi sampah yang meningkat secara signifikan, terutama di wilayah perkotaan, menyoroti urgensi dari upaya pengelolaan sampah yang lebih baik untuk mencapai target ini.

Permasalahan sampah juga terkait dengan Target 12.5 yang menekankan pentingnya pengurangan limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan yang berkelanjutan. Dengan jumlah sampah yang terus meningkat, terutama dalam hal sampah plastik yang sulit terurai, Indonesia perlu meningkatkan

upaya dalam daur ulang dan pengelolaan limbah secara menyeluruh untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Permasalahan sampah mencerminkan tantangan dalam mencapai target yang menekankan perlunya penanggulangan perubahan iklim dan dampaknya. Pembakaran sampah secara tidak terkendali menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global, sehingga pengelolaan sampah yang lebih baik juga merupakan bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim.

Sampah berhubungan dengan target yang menekankan pentingnya pelestarian ekosistem laut. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik cenderung berakhir di laut, menciptakan masalah bagi kehidupan laut dan ekosistemnya. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sampah yang lebih baik juga penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dalam konteks Indonesia, permasalahan sampah menjadi cerminan dari berbagai tantangan dalam mencapai berbagai target SDGs yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi masalah ini demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Permasalahan sampah kini menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup yang belum tertangani dengan baik di berbagai wilayah di Indonesia. Pertumbuhan penduduk menyebabkan jumlah, jenis dan karakteristik sampah yang dikelola negara menjadi semakin beragam. Kapasitas sampah tidak sebanding dengan volume produksi harian, sehingga sampah menumpuk dan tertahan di TPA selama sehari-hari. Selain pencemaran lingkungan, sampah juga dapat menimbulkan gangguan langsung pada

tubuh, seperti bau yang menyengat. Keberadaan limbah yang tidak diolah menimbulkan berbagai penyakit dan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, seperti flu, batuk, infeksi, dan demam berdarah (Hasibuan, 2016).

Pengelolaan sampah, UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 memfokuskan pada pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui keterlibatan masyarakat dan pihak pengelola sampah mulai dari sumber sampah hingga pengelolaan akhir. Namun, perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia yang diikuti dengan semakin besarnya migrasi sebagian penduduk kota ke pedesaan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang juga sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Negara tidak menyediakan sarana dan prasarana yang sebanding, sehingga pelayanan yang ada tidak maksimal dan kualitas lingkungan semakin memburuk, terutama dalam masalah pengangkutan sampah.

Permasalahan sampah yang masih menjadi fokus utama pemerintah Kota Tangerang Selatan, salah satunya pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang yang merupakan tempat pembuangan akhir kota Tangerang Selatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan mengambil peran dan tanggung jawabnya untuk membantu tugas pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi permasalahan lingkungan, salah satunya permasalahan sampah yang ada di kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan dapat menghasilkan timbunan sampah sebesar 1000 ton perharinya dan sekitar 390 ribu ton pertahun yang berasal dari 7 Kecamatan yang ada di kota Tangerang Selatan, namun TPA Cipeucang hanya mampu menampung 300

sampai 400 ton perharinya, dengan tujuan untuk meminimalisir ketinggian sampah agar tidak mencapai batas maksimum. Produksi timbulan sampah akan mempengaruhi oleh jumlah penduduk di kota Tangerang Selatan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. urusan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup yg membawahi Bidang Kebersihan & UPTD pengelolaan sampah di setiap wilayah ada petugas lapangan di bawah bidang kebersihan.

Pembuangan Akhir (TPA) bertujuan sebagai solusi terhadap persoalan sampah yang ada di kota Tangerang Selatan. Karna sebelum TPA diresmikan, Pemerintah kota Tangerang Selatan masih bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengelola sampah, Kabupaten Tangerang. Sistem pengelolaan sampah yang digunakan TPA Cipeucang yakni sistem penampungan terbuka atau open dumping, yang mana sistem *open dumping* merupakan sistem yang kurang optimal untuk jangka panjang karna sampah tersebut akan terus menumpuk tanpa adanya pengolahan dan penanganan lebih lanjut. Dari sistem *open dumping* ini akan memberikan dampak negatif bagi pemukiman penduduk disekitar TPA Cipeucang. Karna jarak pemukiman penduduk TPA kurang dari 500 meter dan dampak yang ditimbulkan akan ada bau tidak sedap seringkali membuat masyarakat tidak nyaman.

Sampah yang menumpuk pada TPA Cipeucang sudah hampir mencapai batas maksimum untuk ketinggian sampah. Daya tampung yang dimiliki oleh TPA Cipeucang hanya mampu menampung ketinggian sampah. Daya tampung yang dimiliki oleh TPA Cipeucang hanya mampu menampung ketinggian kapasitas sampah setinggi 16 meter, dikarenakan posisi TPA yang dekat dengan saluran listrik udara

mengakibatkan pengelola TPA tidak ingin mengambil resiko untuk menampung ketinggian sampah lebih tinggi. Dari penumpukan sampah yang overload, mengakibatkan longsornya tumpukan sampah tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan pada tembok penyangga antara TPA dengan sungai Cisadane. Dari peristiwa longsornya tumpukan sampah sekitar 100 ton sampah menutupi Sebagian aliran sungai Cisadane yang merupakan sumber air yang digunakan oleh Pengelolaan Air Bersih Perusahaan Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Peristiwa tersebut dapat merugikan masyarakat yang menggunakan sungai tersebut sebagai kehidupan sehari-hari. Selain mencemari sungai, dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut yaitu bau menyengat yang membuat masyarakat kurang nyaman. Bau menyengat tersebut tidak hanya di rasakan oleh masyarakat sekitar TPA Cipeucang saja, melainkan masyarakat dapat tercium hingga radius 3 Km.

Negara tidak menyediakan tempat sampah yang cukup. Membuang sampah di depan umum tidak mengenal usia, jenis kelamin, dan status masyarakat. Membuang sampah sembarangan sering terjadi pada kalangan anak-anak, remaja bahkan orang lanjut usia. Bisa jadi anak membuang sampah sembarangan karena meniru atau melihat kebiasaan orang tua atau tetangganya yang tidak menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Sebaliknya lambat laun menjadi kebiasaan yang buruk, karena ketika orang lain sembarangan membuang sampah, namun tidak ada yang menyalahkan atau bahkan mempedulikannya, maka sulit untuk melepaskan sampah.

Pada dasarnya prinsip dan tujuan ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan sampah. Prinsip pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2019 adalah prinsip tanggung jawab, prinsip keberlanjutan, prinsip keuntungan, prinsip keadilan, prinsip kesadaran, prinsip kekompakan, prinsip . . . asas keselamatan, asas keselamatan, dan asas nilai ekonomi. Pada saat yang sama, tujuan pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi jumlah dan dampak sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, dan mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya, serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah masalah yang dapat merugikan rakyatnya seperti yang ada pada TPA Cipeucang. Kewenangan tersebut tertulis dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa, pemerintah daerah memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahny dan juga berwenang untuk menetapkan kebijakan dan peraturan daerahnya sendiri dengan tujuan memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai pengelolaan sampah, sudah diatur dalam PERDA No. 13 Tahun 2019 yang berfungsi sebagai aparatur tentang pengelolaan sampah yang ada di Tangerang selatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis komprehensif dan berkelanjutan. Dalam hal ini termasuk pengurangan dan pengelolaan terhadap sampah. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara terarah dan sistematis, serta dikelola dengan baik untuk meminimalkan dampak negative terhadap masyarakat dan



lingkungan. Isi dari PERDA tersebut salah satunya tugas wajib Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sampah yaitu melaksanakan system pengelolaan sampah yang baik, mengupayakan pengurangan, penanganan, dan daur ulang sampah, serta memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah. Dalam hal ini, pemerintah kota Tangerang Selatan sudah memiliki kewajiban dalam hal pengelolaan sampah, yang mana pemerintah kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup wajib mengupayakan terlaksananya pengelolaan sampah yang baik, yang tidak menimbulkan kerugian bagi warga dan lingkungan sekitar.

Program jangka pendek sekarang ini melanjutkan agenda program kerja yang sudah di buat sebelumnya kondisi tempat pembuangan akhir sampah saat ini mengandalkan pada *landfill* 3 dengan melakukan pengiriman sampah ke Cilowong Serang teramat membantu mengurangi volume gunung sampah di Cipeucang. Pengangkutan pengiriman sampah dari Cipeucang ke Cilowong dengan volume sebesar 400 ton perhari dalam bentuk sampah. Dengan hadirnya TPST 3 (R) di tiap kelurahan juga teramat membantu mengurangi volume sampah karena terjadi pemilahan juga daur ulang sampah sebelum di bawa sampai ke TPA. Selaku kepala UPT Cipeucang yang baru berharap pemerintah bisa menghadirkan teknologi tepat guna di TPA Cipeucang dalam mengelola sampah saat ini mengingat hadirnya Teknologi dalam pengelolaan sampah akan sangat membantu mengurangi volume jumlah sampah yang saat ini begitu besar, sehingga permasalahan sampah di kota Tangerang Selatan bisa tertangani secara bertahap dan berkelanjutan, Pemkot Tangsel membangun (TPST3R). Berdasarkan data DLH Tangsel, jumlah TPST3R cenderung

menurun pada tahun 2021 terdapat 39 TPST3R akan memilah serta mengolah sampah organik dan anorganik sehingga volume sampah bisa ditekan. Tangsel juga kesulitan memperbanyak jumlah TPST3R. Kepala seksi kemitraan pemberdayaan masyarakat DLH menuturkan Ketika hendak membangun TPST3R dilahan kosong, masyarakat yang memiliki atau berada di lahan tersebut menolak, persoalan bau sampah serta lingkungan yang jorok menjadi penyebab penolakan itu.

Sistem pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan harus terus ditingkatkan oleh pemerintah kota Tangerang Selatan, mengingat peristiwa longsornya tumpukan sampah tersebut menjadi saksi bahwa lemahnya sistem pengelolaan sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup harus menguatkan kinerja sarana dan prasarana selain TPA seperti TPS, TPS3R, dan bank sampah yang menjadi tempat pengolahan sampah sebelum masuk pada tahap isolasi di TPA. Karena TPA Cipeucang menggunakan *sistem open dumping* sangat membahayakan kesehatan, baik itu kesehatan lingkungan maupun manusia. Karena dari penumpukan sampah tersebut menimbulkan pencemaran, baik pencemaran udara maupun air dibawahnya. Terlebih lagi, jarak antara TPA sangat dekat dengan pemukiman penduduk, apabila semua elemen system pegelolaan sampah tidak berjalan dengan optimal, dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Data dari Badan Pusat Statistik kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa produksi sampah meningkat seiring dengan penambahan penduduk setiap tahunnya. Sampah yang terus bertambah menyebabkan kondisi di TPA Cipeucang semakin memburuk dengan gunung sampah yang semakin tinggi dan terjadi longsor pada

beberapa kesempatan. Kadis telah menjamin bahwa masalah ini akan segera ditangani dengan kerja sama kembali dengan TPA Lulut Nambo di Bogor dan pengiriman sampah ke Serang akan dilanjutkan. Namun, kondisi ini menunjukkan perlunya tersedianya lahan untuk TPA Regional di wilayah Provinsi Banten karena TPA Cipeucang tidak mampu menampung volume sampah yang ada.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki beberapa tujuan yang penting dalam upaya menanggulangi masalah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. Pertama, mereka bertujuan untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan mengurangi pembuangan sampah di TPA, pemerintah berupaya mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, kualitas air, udara, dan tanah. Dalam rangka mencapai hal ini, mereka berfokus pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, seperti pengurangan sampah melalui program pengelolaan limbah yang efisien, pengolahan sampah organik menjadi kompos, dan daur ulang bahan-bahan yang dapat didaur ulang.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah melindungi kesehatan masyarakat. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dibuang di TPA Cipeucang, mereka berupaya mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat yang dapat timbul akibat pencemaran lingkungan. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan pengolahan limbah di TPA, termasuk penggunaan metode yang aman dan teknologi yang tepat guna untuk mengurangi potensi pencemaran udara, air, dan tanah yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran dan dekomposisi sampah. Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya secara komprehensif untuk mencapai tujuan

pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di TPA Cipeucang. Mereka ingin melindungi lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan sampah. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi penduduk Kota Tangerang Selatan.

Permasalahan yang dihadapi di kota Tangerang Selatan belum baik hal ini dilihat dari beberapa fenomena sebagai berikut: Infrastruktur yang kurang memadai Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah seperti fasilitas pemilahan, dan pengolahan sampah dapat menghambat efisiensi dalam penanganan sampah. Pengelolaan sampah di tujuh kecamatan di Tangsel ini berbasis di tempat pembuangan akhir (TPA) di Cipeucang. Sampah yang terus bertambah di tengah kekurangan lahan, membuat Pemerintah Kota Tangsel mencari terobosan. Jika infrastruktur tidak memadai, proses pengelolaan sampah menjadi terhambat, sehingga sampah masih banyak yang akhirnya terbuang ke TPA tanpa pengolahan yang optimal. Lahan tersisa di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Cipeucang di Serpong, Tangerang Selatan, semakin kritis. Saat ini TPA Cipeucang hanya mengandalkan satu dari tiga TPA yang ada. Di sisa zona pembuangan, ketinggian tumpukan sampah mencapai batas ketinggian maksimum. Karena luas lahan TPA 3 hanya 0,8 hektare, maka batas ketinggian tiang hanya 15 meter. Penempatannya hanya bisa diatur sedemikian rupa sehingga masih ada ruang kosong. Keterbatasan ruang pembuangan membuat TPA Cipeucang hanya mengandalkan pengelolaan sampah. Akibatnya, bongkar muat truk

sampah kerap terhenti. Sederetan truk sampah terlihat bergemuruh di pintu masuk TPA. Puluhan truk tampak harus antri memasuki tempat pembuangan sampah, menunggu ekskavator dan bulldoser membongkar dan membersihkan tumpukan sampah.



**Gambar 1. 1** Terbatasnya lahan pembuangan

Sumber: <https://palapanews.com/2017/01/04/infrastruktur-tpa-rawa-kucing-buruk-mobil-sampah-kerap-ambles/>

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat: Meskipun dana sudah dialokasikan, keberhasilan pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam memisahkan, mengurangi, dan mendaur ulang sampah. Jika masyarakat tidak terlibat secara aktif atau belum memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya pengelolaan sampah, maka kebijakan pemerintah mungkin tidak akan berjalan efisien. (website : <https://tangerangdaily.id/wacana-pltsa-di-tangsel-masih-terkendala-lahan/>)

Yang dimaksud dengan TPA adalah tempat pengolahan akhir. Apa yang terjadi adalah tempat pembuangan sampah. Ketika tumpukan cakram di TPA Cipeucang runtuh, tempat pembuangan akhir berada di sungai. Peristiwa ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena mencemari udara dengan bau yang menyengat, mencemari Sungai Cisadane yang ironisnya merupakan air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tangsel untuk pengolahan air bersih. Belum lagi berkembangnya penyakit pernafasan dan kulit serta masih banyak permasalahan lain yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan TPA Cipeucang. Pencemaran bau, pencemaran air sungai, air lindi yang merembes jauh ke dalam tanah dan sekitar sumur sangat berbahaya bagi kesehatan. Mengutip dan mengutip dari beberapa jurnal ilmiah, bau yang menyengat dari TPA Cipeucang adalah metana dan karbon dioksida sebagai gas dengan konsentrasi tertinggi di TPA dan hidrogen sulfida yang berkontribusi terhadap bau tersebut, yaitu proses penguraian bakteri atau biokimia. Metana sendiri merusak lapisan ozon 25 kali lebih banyak dibandingkan karbon dioksida. Diperkirakan 1 ton sampah menghasilkan 50 kg gas metana. Konsentrasi metana yang tinggi mengurangi jumlah oksigen di atmosfer. Penyebab lain dari edema paru termasuk paparan zat beracun atau obat-obatan atau berada di ketinggian. Gejala-gejala ini dapat muncul dan hilang tergantung pada keadaan dan seiring berjalannya waktu berdasarkan kasus per kasus. Gejalanya dapat berkisar dari ringan hingga ekstrem: batuk, nyeri dada, kelelahan, dan banyak gejala lainnya.

Sampah di kota Tangerang Selatan masih belum baik hal ini ditandai dengan beberapa fenomena sebagai tempat pembuangan akhir sampah di kota Tangerang

Selatan mengalami masalah yang serius, seperti *over*, serta menjadi sumber bencana banjir akibat dampak dari penimbunan sampah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi sampah di TPA Cipeucang menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini relevan dengan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah dalam mengelola sampah di TPA Cipeucang serta menanggulangi dampak negatif yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah dalam mengelola sampah di daerah lain. Saat terjadi banjir, diketahui beton pembatas sampah di pinggir TPA jebol karena tidak mampu menampung sampah melebihi kapasitasnya. Alhasil, jumlah sampah yang mengalir dari TPA Cipeucang ke Sungai Cisadane kurang lebih 50-100 ton. Di apartemen, ketinggian air bisa mencapai lima meter saat terjadi banjir, atau hanya atap lantai dua bangunan yang terlihat dari pengawasan udara. Mereka yang mengaku rakyat kecil tidak bisa berbuat apa-apa selain bersiap menghadapi banjir. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan mengumumkan pihaknya akan mempercepat pengerjaan aliran sampah di Sungai Cisadane. Hingga saat ini, tong sampah tersebut berhasil ditarik hingga jarak 20 meter dari dasar sungai.

Luas totalnya adalah 2,5 hektar. Kalau dihitung ketinggiannya sekitar 16 meter dan sudah lebih berarti sudah kelebihan beban. mencoba meratakan TPA, menunggu pembangunan TPA 3 tengah, setiap hari 300 ton (sampah masuk) ke TPA, terjadi longsor sampah di sungai Cisadane, muncrat hingga 100 ton. lebih dari 50 ton atau 100 ton tertutup aliran sungai. Kami tidak berkomunikasi dengan kota tangerang.



**Gambar 1. 2** Tumpukan sampah yang melebihi kapasitas

Sumber: <https://tangerang.tribunnews.com/2022/09/14/400-ton-sampah-per-hari-masuk-ke-tpa-cipeucang-kota-tangerang-selatan>

Penting nya dilakukan bahwa menanggulangi sampah secara efisien adalah proses yang kompleks dan memerlukan kerja keras dari berbagai pihak terkait. Selain dana yang cukup, pemenuhan infrastruktur yang memadai, kesadaran masyarakat, koordinasi yang baik, dan perubahan pola konsumsi dan produksi juga harus menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan efisiensi penanganan sampah di TPA Cipeucang.

Pemkot Tangerang Selatan dan masyarakat Tangerang Selatan harus bersinergi menjaga dan menertibkan TPA tersebut, agar seluruh sarana dan prasarana yang ada selalu dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik. Masyarakat juga berperan penting dalam mengurangi beban pencemaran akibat sampah dalam jumlah besar, yaitu dengan penerapan prinsip 3R. Selain itu, konsep 3R (reduce, reuse, recycle) harus diterapkan secara efektif dalam pengelolaan sampah. Tujuan dari konsep 3R adalah untuk mengurangi jumlah sampah. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting dalam pengelolaan sampah kota. Terwujudnya kota bersih berdampak pada



peningkatan kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, pengelolaan limbah dan sanitasi yang buruk berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, meningkatkan produksi gas rumah kaca, menyebabkan bencana dan kerugian ekonomi. (<http://poskotanews.com/2016/09/23/akibat-bau-busuk-tpa-cipeucang-tangsel-warga-serba-salah/>)

Sampah yang ada di TPA Cipeucang sebagian besar merupakan sampah rumah tangga, sehingga tidak dapat dihindari jika pola konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan sangat tinggi. Misalnya di pasar atau tempat pembuangan sampah tentunya harus segera dikendalikan dan diolah agar sampah tidak menumpuk dan tidak banyak bocor sehingga tidak tercipta sampah. Itu sebabnya kami memilih judul ini untuk mengeksplorasi kegunaannya dalam mencegah pencemaran limbah.

TPA besar di Tangsel mampu menampung hingga 400 ton per hari. Setiap kota/daerah mempunyai cara tersendiri dalam menangani produksi sampah, mulai dari prinsip 3R hingga penyelesaian akhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Kota Tangsel mempunyai permasalahan kontroversial tersendiri yaitu dimana jumlah sampah semakin meningkat akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, sampah organik/anorganik tidak dipisahkan pada tahap pembuangannya, rata-rata timbulan sampah per orang adalah 0,59 kg/a. orang /hari, dan sampah kota Tangsel yang diserahkan oleh Badan Lingkungan Hidup (DLH Sampah 2023, n.d.). TPA Terbatas milik Kota Tangerang Selatan..

Jebolnya pembatas antara sungai Cisadane dengan TPA Cipeucang sudah sempat di perbaiki tetapi dikarenakan kapasitas sampah yang semakin *over capacity*

karena tidak ada lagi tempat untuk penambahan lahan, langkah yang bisa diambil hanya satu pengolahan menggunakan teknologi atau membangun PLTSA, Dinas Lingkungan Hidup sedang mencari investor yang siap mendanai untuk pembangunan PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dikarenakan PLTSA itu teknologi yang ramah lingkungan.

Dikarenakan belum mendapatkan investor untuk mendanai pembangunan PLTSA maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup melakukan kerja sama dengan daerah-daerah Kabupaten Tangerang, 3 tahun kemarin bekerja sama dengan TPA Cilowong Serang, pada saat ini sedang berupaya lagi bekerja sama di TPA Pandeglag dikarenakan Cilowong penuh.

**Tabel 1. 1** Terbatasnya lahan pembuangan

<b>Tahun</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Timbulan sampah Harian (Ton)</b>	<b>Timbulan Sampah Tahunan (Ton)</b>
2022	Banten	Tangerang selatan	972,63	355,009,43
2021	Banten	Tangerang Selatan	799,07	291,659,27
			177.17	646,668,07

(Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>)

Kota Tangerang Selatan dapat menghasilkan timbulan sampah sehingga dapat dilihat dari data timbulan sampah pada tahun 2022 terjadinya peningkatan timbulan timbulan sampah tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan yang terus mengalami peningkatan hampir setiap tahunnya. Berikut merupakan

data jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan.

**Tabel 1. 2** Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Perkecamatan

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Sex Ratio/Rasio Jumlah Penduduk</b>
Setu	88.676	102,54%
Serpong	159.281	99,37%
Pamulang	311.189	99,83%
Ciputat	213.275	100,11%
Ciputat Timur	173.110	99,14%
Pondok Aren	296.659	100,29%
Serpong Utara	136.276	100,57%
Total	1.378.466	100,08%

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan melalui BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2022*

## **1.2. Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas TPA yang terbatas: TPA Cipeucang mengalami masalah kapasitas yang terbatas dan sudah overload akibat peningkatan volume sampah yang tidak tertampung. Hal ini menunjukkan perlunya lokasi TPA baru yang memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung volume sampah yang terus meningkat.
2. Pencemaran air tanah dan udara: TPA Cipeucang menghadapi masalah pencemaran air tanah dan udara akibat penimbunan sampah yang tidak terkendali. Dampak

negatif ini dapat merusak kualitas air tanah dan menyebabkan polusi udara, mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

3. Potensi bencana banjir: Penimbunan sampah yang tidak terkendali di TPA Cipeucang dapat menjadi penyebab bencana banjir. Ketika sampah menutupi saluran air, aliran air terhambat dan meningkatkan risiko terjadinya banjir, mengancam keselamatan masyarakat dan merusak lingkungan sekitar.
4. Penolakan masyarakat terhadap TPA: Sebelumnya, TPA Cipeucang menghadapi penolakan masyarakat setempat karena dampak negatif yang ditimbulkan, seperti bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan. Masalah ini menunjukkan perlunya pengelolaan sampah yang lebih baik untuk menghindari dampak buruk pada lingkungan dan memperoleh dukungan masyarakat.
5. Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai: TPA Cipeucang menghadapi tantangan dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, terutama terkait dengan sistem pengolahan sampah yang efektif. Diperlukan investasi dan upaya untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk pemanfaatan teknologi yang tepat guna dalam pengurangan, daur ulang, dan pengolahan sampah.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan.
2. Menganalisis faktor pendukung evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk menangani masalah sampah di TPA Cipeucang. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pengelola TPA Cipeucang dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

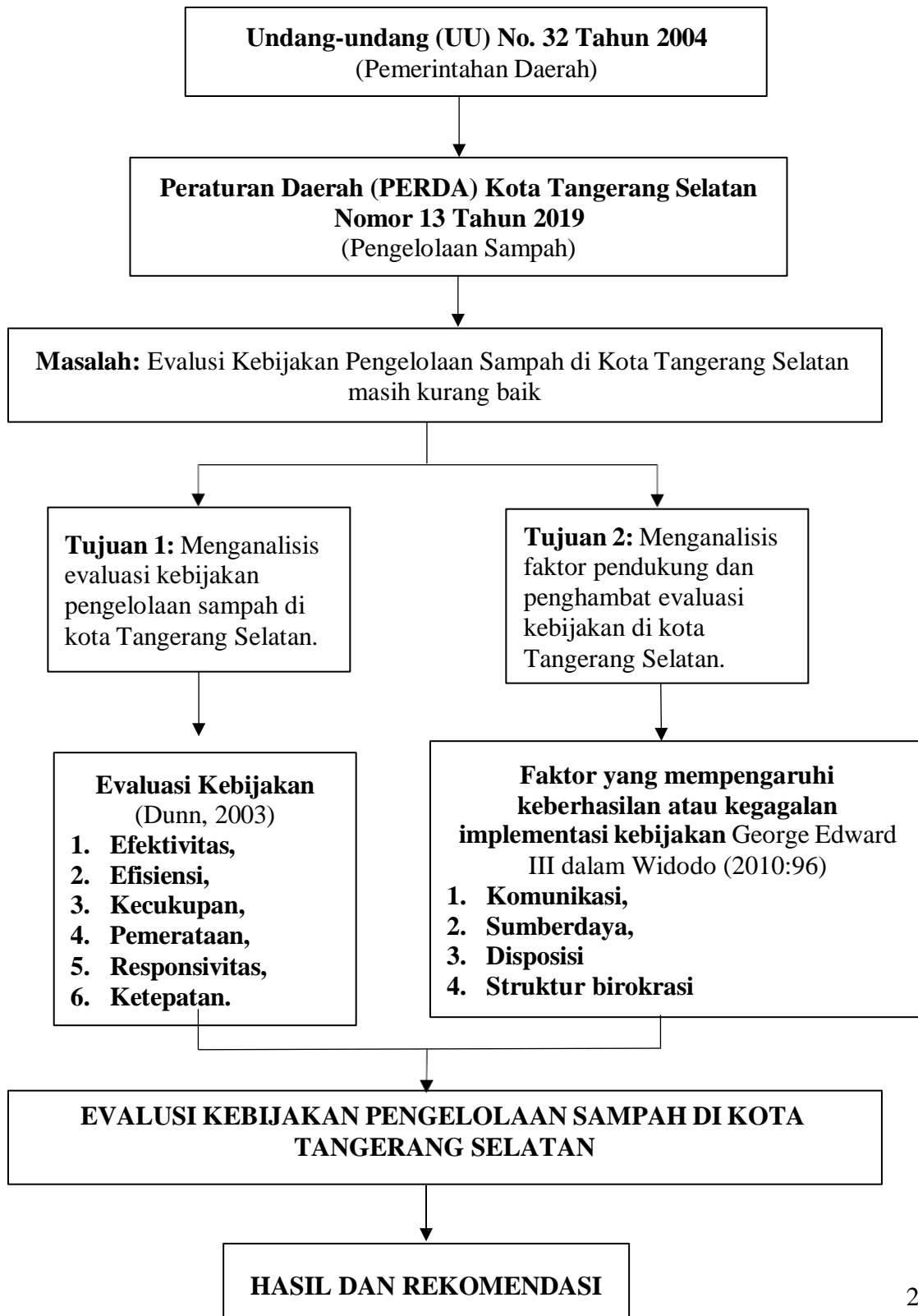
#### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan penelitian lain dalam mengembangkan penelitian di bidang pengelolaan sampah, khususnya dalam konteks kebijakan pemerintah dan pengelolaan TPA.

#### **1.4.3 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman dan teori tentang kebijakan pemerintah dan pengelolaan TPA dalam mengatasi masalah penumpukan sampah. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan konsep dan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan sampah di TPA.

### 1.5. Kerangka Berpikir Dan Konsep



### **1.5.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Salah satu fungsinya ialah untuk mencari perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru. Berikut referensi yang peneliti gunakan dapat dilihat. Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan terkait manajemen sampah di TPA Cipeucang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia, memberikan gambaran komprehensif mengenai keadaan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Penelitian ini meneliti tentang pengelolaan sampah berfokus Evaluasi Kebijakan Sampah di kota Tangerang Selatan bukan berfokus pada menganalisis sistem pengangkutan sampah di TPA. Persamaan dari penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Sampah.

### **1.5.2. Kajian Teori**

#### **1.5.2.1 Administrasi Publik**

Administrasi publik adalah ilmu perencanaan pemerintahan yang baik (Thoha, 2008:94). Administrasi publik adalah langkah koordinasi merancang, menerapkan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat dan mencapai tujuan negara (Wirman, 2012:25). Selanjutnya menurut Ibrahim (2009:17) yaitu penyelenggaraan birokrasi melalui pengelolaan pemerintahan dengan cara kerja dan dukungan SDM. Kemudian Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2010:25) mendeskripsikan sebagai pengelolaan organisasi dari untuk mencapai tujuan bangsa. Administrasi publik merupakan kerja sama dalam organisasi public meliputi yudikatif, legislatif dan eksekutif (Nigro dan Nigro dalam Anggara, 2016:46), Sedangkan Pasolong (2013:8) menggambarkan

administrasi publik adalah kerja sama untuk melaksanakan fungsi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Administrasi publik merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari sistem manajemen pemerintahan, yang berkaitan dengan politik, organisasi, manajemen dan pelayanan. Administrasi publik selalu berhubungan dengan legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Selain itu, administrasi publik erat kaitannya dengan berbagai peraturan dan kebijakan terkait keterbukaan, tujuan negara, manajemen pembangunan, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara dengan baik. Secara gramatikal, administrasi publik mempunyai dua kata utama: administrasi dan publik. Oleh karena itu manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan atau kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kata publik diartikan sebagai negara dan warga negara, atau masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa administrasi publik pada intinya merupakan pelaksanaan pembangunan dan mengurus atau memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat negaranya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang. Administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu telah mengalami evolusi yang kompleks. Literatur menjelaskan hal ini melalui serangkaian perubahan paradigma dalam perkembangan administrasi publik. Nicholas Henry (2004) mengidentifikasi lima paradigma dalam administrasi publik, sebagai berikut:

- 1) Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (Tahun 1900-1926)



Pada paradigma pertama, kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat menjadi pusat perhatian politik. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut.

#### 2) Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (Tahun 1927-1937)

Pada paradigma kedua prinsip-prinsip administrasi digunakan sebagai fokus administrasi publik. Prinsip tersebut antara lain planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting.

3) Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (Tahun 1950-1970) Pada paradigma ketiga, teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Sehingga muncul anggapan bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan. Namun pada paradigma ini administrasi publik dianggap kehilangan jati dirinya karena ilmu politik.

#### 4) Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (Tahun 1956-1970)

Pada paradigma keempat, prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi muni yang didukung dengan disiplin ilmu psikologi sosial, serta yang berorientasi pada kebijakan publik.

#### 5) Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970an)

Paradigma kelima memiliki fokus dan lokus yang jelas antara lain teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah publik.

6) Paradigma Administrasi Publik sebagai *Governance* (sejak 1990-sekarang)

Pada paradigma keenam, administrasi publik fokus terhadap terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan amanah. Tatanan pemerintahan yang demokratis serta diselenggarakan secara baik, bersih, transparan dan berwibawa dapat melahirkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang demokratis menekankan lokus dan focus kekuasaan tidak hanya berada di pemerintah, melainkan beralih terpusat pada tangan rakyat. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik terletak pada hubungan antara tiga komponen rakyat, pemerintah dan pengusaha yang berjalan secara kohesif, selaras, kongruen serta sebanding.

Penelitian ini fokus pada paradigma ke-6 yaitu Paradigma Administrasi Publik sebagai *Governance*.

### **1.5.2.2 Kebijakan Publik**

Istilah bahasa Inggris public policy sering disebut dengan general policy. Definisi kebijakan publik sangat beragam. Banyak sarjana yang mendefinisikan kebijakan publik dalam berbagai literatur. Masing-masing ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai kebijakan publik, namun pada dasarnya tetap sama, yaitu apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah. Untuk memudahkan pemahaman dan penafsiran kebijakan publik, penulis memadukan pendapat beberapa ahli.

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye (Public policy) yang dikutip oleh Subarsono (2009:2) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah segala sesuatu yang pemerintah putuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is what the goverde Decisions to do or not do*)”. Selain itu, Subarsono (2009:2) mengartikan politik menurut Thomas R Dye bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, bukan swasta, dan (2) kebijakan publik adalah mengenai pilihan-pilihan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah.

Pendapat senada diungkapkan oleh George C Edwards III dan Sharkansky, Widodo (2012:12) yang mengatakan: “Apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Apakah maksud atau tujuan program pemerintah merupakan kebijakan publik adalah apa yang dikatakan pemerintah .dan melakukan atau tidak Kebijakan adalah serangkaian tujuan dan sasaran pemerintah.atau mempengaruhi (3) apa dampak dan dampak dari kebijakan publik.

Definisi lain mengenai politik datang dari Frederick yang dikutip dalam Islamy (2009:17) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “Suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menghadirkan hambatan dan peluang bagi kebijakan tersebut diusulkan. untuk digunakan dan dimenangkan untuk mencapai suatu tujuan atau melaksanakan suatu tujuan atau sasaran (serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, menunjukkan hambatan dan peluang untuk melaksanakan kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan tertentu)”.

Sementara itu, Anderson yang dikutip dalam Widodo (2012: 13), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik, antara lain mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan berisi tindakan pemerintah bukan organisasi swasta
- b. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah
- c. Kebijakan publik selalu berdasarkan pada peraturan tertentu yang bersifat memaksa
- d. Kebijakan selalu berorientasi pada tujuan tertentu

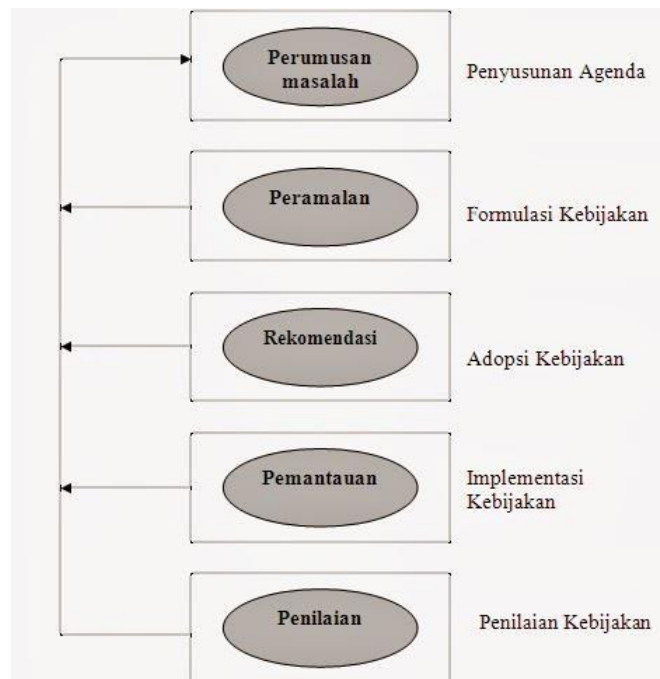
Berdasarkan pengertian tersebut dan unsur-unsur yang termasuk dalam kebijakan, maka kebijakan publik diciptakan untuk memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Maksud dan tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan permasalahan publik yang timbul dalam masyarakat. Hanya permasalahan publik yang dapat membuat banyak orang berpikir dan mencari solusi yang dapat membentuk kebijakan publik (Widodo, 2012:15).

Melihat perbedaan definisi kebijakan publik yang diuraikan di atas oleh berbagai ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tindakan-

tindakan tersebut biasanya diimplementasikan dalam bentuk program-program yang disusun oleh aktor-aktor politik. Kebijakan ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

### 1.5.2.3. Tahapan Kebijakan Publik

Berdasarkan pembahasan di atas kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut menurut Willam N Dunn (Hidayanti, 2018) terbagi menjadi 5 (lima) tahap sebagai berikut:



**Gambar 1. 3** Diagram Proses Penyusunan Kebijakan Publik

Sumber: <http://rizkie-library.blogspot.com/2015/12/kebijakan-publik-sebuah-konsep.html>

Gambar 1. 3 menunjukkan diagram proses penyusunan kebijakan publik. Diagram tersebut terdiri dari tujuh tahap, yaitu:

### 1. Perumusan masalah

Tahap ini merupakan tahap awal dalam penyusunan kebijakan publik. Pada tahap ini, masalah atau isu publik yang perlu dipecahkan diidentifikasi. Masalah atau isu publik dapat diidentifikasi melalui berbagai sumber, seperti media massa, laporan penelitian, atau hasil survei.

### 2. Peramalan

Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah atau isu publik yang telah diidentifikasi. Informasi yang dikumpulkan dapat berupa data, statistik, hasil penelitian, atau opini ahli.

### 3. Formulasi kebijakan

Tahap ini merupakan tahap inti dalam penyusunan kebijakan publik. Pada tahap ini, berbagai alternatif kebijakan dirumuskan untuk mengatasi masalah atau isu publik yang telah diidentifikasi. Alternatif kebijakan yang dirumuskan haruslah realistis dan dapat diimplementasikan.

### 4. Rekomendasi

Tahap ini merupakan tahap di mana alternatif kebijakan yang telah dirumuskan direkomendasikan kepada pembuat kebijakan. Rekomendasi tersebut haruslah disertai dengan analisis yang komprehensif tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif kebijakan.

### 5. Adopsi kebijakan

Tahap ini merupakan tahap di mana pembuat kebijakan memutuskan untuk mengadopsi salah satu alternatif kebijakan yang telah direkomendasikan. Keputusan

adopsi kebijakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan politik, kepentingan kelompok, atau ketersediaan sumber daya.

#### 6. Implementasi kebijakan

Tahap ini merupakan tahap di mana kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan. Implementasi kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat.

#### 7. Penilaian kebijakan

Tahap ini merupakan tahap di mana kinerja kebijakan yang telah dilaksanakan dinilai. Penilaian kebijakan dapat dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuannya.

Berdasarkan gambar 1. 3, tahap-tahap penyusunan kebijakan publik menurut William Dunn dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu proses pembuatan kebijakan (policy making) dan proses evaluasi kebijakan (policy evaluation). Proses pembuatan kebijakan terdiri dari tahap perumusan masalah, peramalan, formulasi kebijakan, rekomendasi, dan adopsi kebijakan. Proses evaluasi kebijakan terdiri dari tahap implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, seperti pembuat kebijakan, ahli, kelompok kepentingan, dan masyarakat. Proses evaluasi kebijakan juga merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat telah mencapai tujuannya.

Penelitian ini masuk di tahap akan meneliti tentang penilaian kebijakan atau evaluasi kebijakan.

#### 1.5.2.4 Evaluasi Kebijakan

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya evaluasi; hasil Menurut Bryan dan White (1987), evaluasi adalah upaya mendokumentasikan dan mengevaluasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang prasyarat pelaksanaan program/rencana dan kemudian.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang melibatkan evaluasi kebijakan yang melibatkan isi, implementasi, dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan operasional. Artinya, kebijakan tersebut dievaluasi tidak hanya pada akhir, namun selama proses politik. (*evaluation*), penomoran (*evaluation*), dan evaluasi (*evaluation*) menunjukkan bahwa evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mencari, dan memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Evaluasi Kebijakan adalah merupakan proses untuk mempelajari konsekuensi dari suatu kebijakan serta mengumpulkan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan-kebijakan selanjutnya. Subarsono (2016:119) mengemukakan pendapat bahwa “Evaluasi Kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan”.

Menurut Subarsono (2016:120) Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:



- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610), istilah evaluasi mempunyai arti yang saling terkait, yang masing-masing merujuk pada penerapan berbagai skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penilaian). Evaluasi melibatkan pengumpulan informasi tentang nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang kinerja politik, yaitu. sejauh mana kebutuhan, nilai dan peluang telah dicapai melalui tindakan publik. Walaupun evaluasi politik berkaitan dengan keseluruhan

proses politik, namun evaluasi politik lebih mementingkan keseluruhan proses politik, namun evaluasi politik lebih mementingkan tindakan politik, khususnya implementasi kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan metode analisis politik lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi berfokus pada evaluasi kebutuhan atau nilai kebijakan dan program. Evaluasi pada dasarnya adalah penentuan manfaat atau kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau program, bukan sekadar upaya mengumpulkan informasi tentang hasil yang diharapkan dari tindakan kebijakan. Karena arti dari tujuan dan sasaran kebijakan selalu dapat dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi Fakta Nilai. Persyaratan penilaian bergantung pada fakta dan nilai. Mengatakan bahwa suatu kebijakan atau program tertentu telah mencapai efektivitas tertinggi (atau terendah) tidak berarti bahwa hasil kebijakan tersebut bernilai bagi banyak individu, kelompok, atau seluruh masyarakat. Kesimpulan ini harus didukung oleh bukti bahwa hasil kebijakan sebenarnya merupakan hasil tindakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat untuk evaluasi. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga

mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);

3. Dualitas Nilai. Nilai-nilai dibalik persyaratan penilaian mempunyai kualitas ganda karena dipandang sebagai tujuan dan sarana. Evaluasi sama saja dengan rekomendasi sepanjang menyangkut nilai-nilai yang ada yang dapat dianggap internal (perlu bagi diri sendiri) atau eksternal (diperlukan karena mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai sering kali disusun dalam hierarki yang mencerminkan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran.

Jika kebijakan dipandang sebagai model tindakan yang berurutan, maka menurut Winarno (2008:225), evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses strategi. Namun sebagian ahli berpendapat sebaliknya, bahwa evaluasi bukanlah langkah terakhir dalam proses kebijakan publik. Pada dasarnya kebijakan publik dilaksanakan dengan suatu tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik memberikan hasil yang diharapkan. Seringkali kebijakan nasional tidak mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Samodra Wibawa (1994), evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi yaitu:

1. *Ekplanasi*. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas

yang diamati. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan;

2. *Kepatuhan*. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;

3. *Audit*. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;

4. *Akunting*. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Sedangkan fungsi evaluasi menurut Agustino (2006:188-189) adalah:

1. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan;
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu: “Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).

### 1.5.2.5. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Evaluasi suatu program atau kebijakan umum memerlukan adanya kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan umum. Kriteria yang dirumuskan dapat dijadikan indikator untuk menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok- kelompok yang berbeda dalam masyarakat;

5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Secara umum menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan public sebagai berikut:

**Tabel 1. 3** Kriteria Evaluasi menurut Dunn (2003)

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang ingin dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecakupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan, kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Nugroho R. 2014. *Public Policy*

### **1.5.2.6. Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan pengolahan sampah (UU No. 18 Tahun 2008). Menurut Jätehuolto (2021), pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah dari awal sampai akhir, meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan, serta pengawasan dan peraturan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah dapat disebut sebagai “entry point” untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, karena merupakan topik multidisiplin yang mempengaruhi berbagai aspek masyarakat dan perekonomian. Pengelolaan sampah berkaitan dengan masalah kesehatan, perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, keamanan pangan dan sumber daya alam, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan (UNEP, 2015). Namun pengelolaan sampah juga dapat dianggap sebagai “protokol sistem”. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah persebaran dan kepadatan penduduk, karakteristik sosial ekonomi dan lingkungan fisik, sikap, perilaku dan budaya dalam masyarakat (Sahil, 2016).

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah khusus. Sampah yang tidak diolah dengan baik mempunyai beberapa dampak negatif. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai berbagai tujuan, khususnya pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan tanggung jawab konsumsi dan produksi yang telah dilaksanakan (SDG 12).

Konsumsi yang berlebihan tentu saja menimbulkan sampah berlebih yang berdampak pada luas tempat pembuangan sampah yang ada. Tiga perempat dari simpanan terbesar di dunia terletak di pantai. Banyak pantai yang dipenuhi oleh buangan bahan dan zat berbahaya serta berbagai macam jenis sampah, seperti sisa jaring ikan plastik, puntung rokok, dan sedotan plastik. Hal ini tentunya akan memengaruhi ekosistem yang ada di laut (SDGs 14). Selain ekosistem laut, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan memengaruhi ekosistem darat (SDGs 15). Sebagai contoh adalah sampah anorganik plastik yang tidak dapat terurai di tanah sehingga banyak sampah plastik yang menyumbat saluran air maupun sungai, serta dapat tertelan oleh beberapa hewan.

Praktik manufaktur yang buruk menghasilkan limbah kimia yang mencemari tanah dan sungai di sekitarnya. Hal ini berdampak pada jumlah sumber air bersih (SDG 6). Selain ekosistem laut dan darat, pengelolaan sampah berkelanjutan dapat meningkatkan penghidupan dengan mengurangi polusi udara (SDG 3). Misalnya, masyarakat membuang sampah konsumen atau membakarnya. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan mengurangi dampak kesehatan dari pembakaran terbuka.

Limbah atau sampah yang tidak dikelola dengan baik menghasilkan tambahan metana dan karbon dioksida. Hal ini tentu saja berimplikasi pada perubahan iklim saat ini, sehingga pengelolaan sampah dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perubahan iklim (SDG 13). Sebaliknya sampah yang dikelola dan dibuang dengan baik tentu mempunyai banyak manfaat, salah satunya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat (SDG 8). Sampah yang dapat didaur ulang dan didaur ulang dapat



menciptakan potensi ekonomi bagi masyarakat yang dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan perekonomiannya.

Sampah adalah limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau proses alam. Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan terencana, komprehensif dan berkelanjutan yang berkaitan dengan pengurangan dan penghapusan sampah. Pengelolaan sampah tidak hanya melibatkan aspek teknis saja, namun juga aspek lain seperti pengelolaan, keuangan, hukum, dan partisipasi masyarakat. Di negara maju, pengelolaan sampah sering disebut dengan pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan akhir dengan perlakuan yang baik terhadap kesehatan, ekonomi, estetika, lingkungan, teknologi, konservasi dan sikap kewarganegaraan. Pengelolaan sampah yang sukses melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk teknik sipil, perencanaan kota, ekonomi, kesehatan masyarakat, estetika, komunikasi dan konservasi.

Ada beberapa masalah dalam pengelolaan sampah kota yang dapat diidentifikasi melalui evaluasi, termasuk kompleksitas masalah sampah akibat pertumbuhan penduduk kota, kebutuhan untuk meningkatkan metode pengelolaan sampah dengan peningkatan kepadatan penduduk, dan heterogenitas sosial-budaya penduduk kota. Ada juga masalah dalam alokasi dana dan prioritas penanganan sampah yang rendah dari pemerintah daerah, pergantian teknik pengemasan makanan menuju pengemas yang tidak dapat terurai seperti plastik, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani masalah sampah.

Pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa landasan teori mengenai cara pengelolaan sampah di TPA:

#### 1. Pemisahan dan Pengelompokan Sampah

Salah satu langkah awal dalam pengelolaan sampah di TPA adalah melakukan pemisahan dan pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya. Hal ini dilakukan agar sampah dapat diolah dan diproses secara lebih efektif dan efisien. Menurut Majid et al. (2019), pemisahan sampah dapat dilakukan berdasarkan jenis sampah organik, non-organik, dan bahan berbahaya dan beracun (B3).

#### 2. Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah

Setelah dilakukan pemisahan dan pengelompokan sampah, langkah selanjutnya dalam pengelolaan sampah di TPA adalah pengolahan dan pemanfaatan sampah. Pengolahan sampah di TPA dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pengomposan, pembakaran, atau pengolahan biologis. Menurut studi yang dilakukan oleh Afroz et al. (2017), pengolahan sampah melalui teknologi pengomposan di TPA dapat menghasilkan kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk organik.

#### 3. Pemantauan Kualitas Air dan Udara

Pengelolaan sampah di TPA dapat berdampak pada kualitas air dan udara di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas air dan udara di sekitar TPA secara berkala. Menurut studi yang dilakukan oleh Sutanto et al. (2020), pemantauan kualitas air dan udara di sekitar TPA dapat

dilakukan dengan melakukan pengukuran parameter seperti BOD, COD, TSS, pH, suhu, dan kandungan logam berat.

#### **1.5.2.7. Aspek-aspek Pengelolaan Sampah**

Sesuai dengan UU Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pada saat yang sama, pengelolaan sampah adalah proses yang sistematis, komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan pengurangan dan penghapusan sampah. Pengelolaan sampah tidak hanya melibatkan aspek teknis, namun juga aspek lain seperti pengelolaan sampah, keuangan, peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat, termasuk produsen sampah dan pihak swasta.

Bagi negara-negara maju, pengelolaan sampah sering diartikan sebagai pengelolaan produksi sampah yang dimulai dengan containerisasi, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir dengan perlakuan terbaik dari sudut pandang kesehatan, ekonomi, estetika, lingkungan, teknologi, konservasi alam. dan juga sikap sosial.

Dalam pengolahan dan tanggung jawab pengelolaan sampah, terdapat beberapa skala pengolahan yang terdiri dari: skala Individu, skala Kawasan, dan skala Kota. Skala Individu melibatkan pengelolaan sampah secara terpisah pada dampak rumah tangga dan non-rumah tangga. Kegiatan pengolahan sampah pada skala ini mencakup pemilahan, pengomposan, biogas, ekstraksi kerajinan dari sampah organik, dan daur ulang. Skala Kawasan melayani ratusan rumah tangga di dekat sumber sampah dan

melibatkan warga sekitar. Contoh dari skala ini adalah pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), yang berfungsi untuk memilah sampah sebelum diolah.

Skala Kota dilakukan pada lokasi yang lebih luas dengan limbah yang dihasilkan dalam jumlah besar dan biasanya dikelola oleh organisasi swasta atau profesional. Kegiatan pengolahan sampah pada skala ini meliputi pemisahan sampah, pengomposan, pemanfaatan kembali energi (Waste to Energy), dan daur ulang. Penumpukan sampah yang terus meningkat akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan apabila tata kelola sampah yang baik tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, pemerintah kota Tangerang Selatan harus dapat menangani permasalahan penumpukan sampah di TPA Cipeucang dengan mengadopsi tata kelola sampah yang cocok dengan tipologi, karakteristik, demografi, geografi, dan kemampuan ekonomi daerah tersebut.

Pengelolaan sampah melibatkan banyak aspek, termasuk aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut ini adalah landasan teori mengenai beberapa aspek penting dalam pengelolaan sampah:

#### 1. Aspek Teknis

Aspek teknis dalam pengelolaan sampah meliputi pemilihan teknologi, infrastruktur, dan prosedur operasional yang sesuai dengan kondisi setempat. Teknologi pengolahan sampah yang tepat akan membantu mengurangi dampak lingkungan dari sampah dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Infrastruktur seperti tempat pembuangan akhir, tempat pemilahan sampah, dan tempat pengolahan sampah perlu dirancang dengan baik agar dapat menampung

jumlah sampah yang dihasilkan. Selain itu, prosedur operasional yang jelas dan terstandarisasi akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah.

## 2. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi dalam pengelolaan sampah meliputi biaya pengelolaan sampah dan manfaat yang dapat diperoleh dari pengolahan sampah. Pengelolaan sampah yang baik harus mempertimbangkan biaya dari seluruh siklus pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Manfaat ekonomi dari pengolahan sampah dapat berupa penghasilan dari penjualan produk olahan sampah, penghematan biaya pembuangan, dan pengurangan biaya pengelolaan sampah.

## 3. Aspek Sosial

Dimensi sosial dalam pengelolaan sampah adalah partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan akses yang memadai terhadap layanan pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, layanan pengelolaan sampah harus tersedia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

## 2. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan dalam pengelolaan sampah meliputi pengurangan dampak lingkungan dari sampah dan pemulihan lingkungan yang terkena dampak dari

sampah. Pengurangan dampak lingkungan dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, mengurangi toksisitas sampah, dan memperbaiki teknologi pengolahan sampah. Pemulihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara merehabilitasi lahan bekas pembuangan sampah dan memanfaatkan produk olahan sampah sebagai bahan bakar alternatif..

#### **1.5.2.8 Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi Kebijakan yang dimaksud dengan penelitian ini adalah menilai kebijakan tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan yang di lihat dari beberapa indikator:

1. Efektivitas, yaitu kebutuhan untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan baik dari segi tujuan, sasaran, dan tindakan yang tepat.
2. Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil terbaik dengan menggunakan sumber daya yang ada.
3. Kecukupan adalah kebijakan pelaksanaan program dan standar yang ditetapkan antara manajemen dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.
4. Perataan adalah pencapaian hasil politik bagi organisasi dan lingkungan secara keseluruhan berdasarkan tindakan dan aktivitas.
5. Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi dalam memahami kebutuhan masyarakat serta melaksanakan dan mengembangkan program berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

6. Ketepatan yaitu keutuhan eksekusi yang dilakukan melalui tindakan yang diperintahkan untuk mencapai tindakan eksekusi yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, evaluasi merupakan peninjauan terhadap pelaksanaan program yang telah selesai dan digunakan untuk peramalan, perhitungan, dan arah pelaksanaan program di masa depan yang jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat ke depan dibandingkan melihat kesalahan masa lalu dan tercermin dalam upaya meningkatkan peluang keberhasilan program.

### **1.5.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Menurut para ahli, terdapat banyak model implementasi, antara lain model implementasi kebijakan publik Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980), dan Masmanian dan 17 Sabatier (1987). Menurut George Edward III Widodo (2010:96), ada empat faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan, antara lain: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi

#### **a. Komunikasi**

Implementasi akan efektif ketika mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan memahami inisiatif dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, kejelasan metode dan tujuan politik harus dikomunikasikan dengan baik kepada para pelaksana. Konsistensi atau kesatuan antara tahapan dan tujuan utama harus dikomunikasikan agar para pelaksana mengetahui secara pasti ruang lingkup dan tujuan kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses yang sangat kompleks dan sulit. Anda dapat menyimpan atau mendistribusikannya hanya untuk

tujuan tertentu. Selain itu, sumber informasi yang berbeda menyebabkan penafsiran yang berbeda pula. Efektivitas undang-undang tersebut mengharuskan pihak yang berwenang mengetahui bagaimana menerapkan keputusan tersebut jika mereka bisa. Dalam praktiknya, seluruh karyawan harus setuju untuk menerapkan kebijakan tersebut dan bersikap jelas serta transparan mengenai tujuannya. Begitu para aktor politik memahami ambiguitas definisi politik, mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud. Politisi bingung dengan apa yang mereka lakukan dan tidak mencapai hasil terbaik dalam pekerjaannya. Komunikasi yang tidak memadai dengan para profesional mempunyai dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah seberapa jelas dan konsisten program tersebut dilaksanakan dan seberapa tepat pesan-pesan yang disampaikan. Jika staf yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tidak mempunyai sarana untuk melaksanakan tugasnya. Komponen sumber daya ini mencakup jumlah personel, keahlian pelaksana, ketersediaan informasi dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, ketersediaan kewenangan untuk memastikan bahwa program dikelola sesuai harapan, dan ketersediaan sumber daya pendukung untuk melaksanakan program, kegiatan, seperti keuangan dan infrastruktur.

Kurangnya sumber daya manusia (kapasitas dan kapabilitas) menyebabkan program tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kurangnya pengawasan yang baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka



keterampilan/kemampuan pelaksana harus ditingkatkan untuk melaksanakan program. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan SDM yang baik untuk meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan melaksanakan program ini disebabkan karena mereka mempunyai kebijakan penghematan energi yang baru, dimana pelaksanaan program ini memerlukan keahlian khusus.

Informasi adalah sumber daya yang berharga untuk implementasi kebijakan. Ada dua jenis informasi: dengan kata lain, informasi tentang cara melaksanakan kebijakan/program, langkah-langkah yang perlu diketahui manajer, dan informasi lain untuk mematuhi peraturan perundang-undangan pemerintah. Realita yang terjadi di industri adalah kalangan menengah tidak mengetahui kebutuhan para pelaksana di lapangan. Kurangnya pengetahuan/pengetahuan mengenai implementasi kebijakan mempunyai akibat langsung seperti tidak bertanggung jawabnya pelaksana atau tidak adanya implementasi sehingga menimbulkan inefisiensi. Implementasi kebijakan memerlukan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan yang berlaku dari otoritas..

Sumber daya penting lainnya juga adalah wewenang untuk menugaskan pelaksanaan program, wewenang untuk menggunakan/mengelola dana, baik itu memberikan uang, memperoleh staf, atau mendapatkan guru. Fasilitas seperti kantor, peralatan dan dana yang memadai harus tersedia untuk pelaksanaan kebijakan/program. Tanpa fungsi ini, eksekusi program tidak mungkin dilakukan..

c. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pengambil kebijakan. Jika pengambil kebijakan setuju dengan isi kebijakan maka ia akan bersedia untuk melaksanakannya, namun jika berbeda pendapat dengan pengambil keputusan maka akan banyak permasalahan yang muncul pada saat implementasi.

Ada tiga cara berbeda untuk menangani kebijakan yang berbeda. Pengetahuan pelatih, instruksi/instruksi kepada saksi untuk merespon menerima atau menolak permasalahan dan kekuatan respon terhadapnya. Walaupun pelaksana program memahami maksud dan tujuan program, namun sering kali mereka gagal melaksanakan program dengan baik karena menolak tujuan program dan menghindari pelaksanaan program serta menyembunyikannya di tempat lain. Selain itu, organisasi harus didukung untuk mencapai tujuan program.

Dukungan administratif sangat mempengaruhi pelaksanaan program untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Ekspresi dukungan kepemimpinan ini menjadikan kebijakan sebagai prioritas program, menempatkan pelaksana di antara pendukung program, dengan mempertimbangkan keseimbangan karakteristik wilayah, agama, etnis, gender, dan demografi lainnya. Selain itu, dana yang cukup akan dialokasikan untuk mendorong pelaksana program untuk sepenuhnya mendukung dan bekerja dengan implementasi kebijakan/program.

#### d. Struktur Birokrasi

Argumentasi mengenai politik organisasi tidak dapat dipisahkan dari struktur kelembagaan. Struktur birokrasi merupakan ciri-ciri, proses, dan pola hubungan

dalam lembaga administratif yang mempunyai hubungan kuat dan erat dengan pelaksanaan kebijakan. Van Horn dan Van Meter mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi ketika menerapkan kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pemantauan keputusan dan proses pada subbagian di lembaga pelaksana;
3. sumber daya politik organisasi (misalnya dukungan antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas dan tingkat kebebasan berkomunikasi yang relatif tinggi dengan orang di luar organisasi;
6. Hubungan formal dan informal lembaga dengan pengambil keputusan atau badan pengambilan keputusan.

Jika terdapat cukup sumber daya untuk melaksanakan kebijakan dan para pelaksana mengetahui apa yang perlu dilakukan, implementasi akan tetap gagal jika struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang rumit memerlukan kerja sama banyak orang, dan pemborosan sumber daya akan mempengaruhi hasil implementasinya. Perubahan yang dilakukan tentunya berdampak pada individu dan sistem di seluruh birokrasi.

## 1.5 Operasionalisasi Konsep

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan adalah untuk menguji ketercapaian dalam mengurangi kuantitas dan dampak sampah dengan dampak sampah dengan fenomena sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan.
  - a. *Efektivitas* mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan apakah suatu alternatif kebijakan atau program mampu mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari tindakan tersebut. Hal ini umumnya diukur dari hasil konkret yang dihasilkan oleh program atau nilai moneter yang dihasilkan.
  - b. *Efesiensi*, dalam konteks kebijakan publik, merujuk pada penggunaan sumber daya yang optimal dalam mencapai tujuan tertentu. Dunn menjelaskan bahwa efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, dan sering diukur dalam perbandingan biaya per unit produk atau layanan.
  - c. *Kecukupan* terkait dengan sejauh mana tingkat efektivitas yang telah dicapai memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang memicu munculnya masalah. Ini berarti bahwa kebijakan harus mampu memenuhi kebutuhan yang ada dan memberikan solusi yang memadai terhadap permasalahan yang dihadapi.

- d. *Perataan* mencakup aspek kesamaan atau keadilan dalam distribusi akibat dan usaha antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan distribusi yang adil dari manfaat atau beban kebijakan di antara masyarakat.
  - e. *Responsivitas*, menurut Dunn, mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya tanggapan atau respon dari masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.
  - f. *Ketepatan* merujuk pada evaluasi sejumlah alternatif kebijakan untuk memastikan apakah hasil yang dihasilkan merupakan pilihan yang tepat dan layak. Hal ini berhubungan dengan substansi tujuan daripada cara atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Faktor pendukung dan penghambat evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan.
- a. Komunikasi  
Implementasi akan efektif jika orang-orang yang bertanggung jawab mencapai tujuan kebijakan memahami inisiatif dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, kejelasan cara dan tujuan politik harus disampaikan dengan baik kepada para pelaksana. Konsistensi atau kesatuan langkah-langkah dan tujuan utama harus dikomunikasikan sehingga para pelaksana mengetahui secara pasti ukuran dan tujuan kebijakan tersebut.
  - b. Sumberdaya

Kurangnya sumber daya manusia (kapasitas dan kapabilitas) menyebabkan program tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kurangnya pengawasan yang baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka keterampilan/kemampuan pelaksana harus ditingkatkan untuk melaksanakan program. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan SDM yang baik untuk meningkatkan kinerja program.

c. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika para pelaksana sepakat mengenai isi suatu kebijakan, maka mereka akan dengan senang hati melaksanakannya, namun jika pandangan mereka berbeda dengan pengambil keputusan, banyak masalah yang muncul dalam proses implementasi. Ada tiga bentuk sikap/respon implementasi terhadap kebijakan yang berbeda; kesadaran pelaksana, petunjuk/instruksi kepada pelaksana dalam menyikapi program kearah diterima atau ditolak, dan intensitas menyikapinya. Pelaksana mungkin memahami maksud dan tujuan program, namun sering kali gagal melaksanakan program dengan baik karena menolak tujuan yang terkandung di dalamnya sehingga secara diam-diam mengalihkan dan menghindari pelaksanaan program.

d. Struktur Birokrasi

Perdebatan mengenai politik eksekutif tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah ciri-ciri, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam lembaga-lembaga administratif yang mempunyai hubungan potensial dan

aktual dengan apa yang mereka miliki dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama banyak orang, dan pemborosan sumber daya mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentu saja akan berdampak pada individu maupun sistem di birokrasi secara keseluruhan.

### **1.6. Argumen Penelitian**

Penelitian ini dikarenakan isu terhadap sampah ini. Permasalahan yang paling utama salah satunya sampah melebihi kapasitas yang seharusnya sehingga merusak lingkungan sekitar contohnya Sungai, dikarenakan sampah yang menggunung, bahkan membuat aliran sungai Cisadane terhambat. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus warga sekitar yang tinggal dekat TPA tersebut. Dimana seharusnya pemerintah lebih menjaga dan perhatian terjadinya sampah yang menggunung ini.

### **1.7. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui gambaran secara khusus mengenai program pengolahan sampah masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan dimana hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk deskripsi atau menggambarkan bagaimana pengolahan sampah masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran lingkungan.

Suharsimi (2010:3) menyatakan bahwa: Metode deskriptif adalah suatu metode untuk mempelajari kondisi, keadaan, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

Sugiyono (2010: 1) menyatakan selain pendapat Suharsim bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mempelajari keadaan alam suatu

benda, (berlawanan dengan eksperimen) yang instrumen kuncinya adalah peneliti, teknik pengumpulan data diatur misalnya. triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Merujuk pada pendapat Sugiyono (2010: 1) di atas, metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mempelajari obyek-obyek alam dan hasil penelitiannya dilihat lebih dalam maknanya. Menurut Sugiyono (2010:1), metode penelitian ini lahir karena adanya pergeseran paradigma dalam kajian realitas/fenomena/gejala. Disebut juga metode etnografi karena metode tersebut pada mulanya digunakan terutama dalam kajian antropologi budaya, disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti menemukan permasalahan yang mendalam terkait dengan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan. Selain itu pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini memenuhi ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (2010:9), yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).



Melihat dari karakteristik penelitian kualitatif tersebut peneliti merasa bahwa karakteristik tersebut cocok dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Peneliti melakukan penelitian secara langsung kepada sumber data yaitu pengelola program mengenai program pengolahan sampah.

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu pengumpulan data yang meliputi deskripsi dan penjelasan terhadap objek yang ada. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang sistematis tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah TPA Cipeucang.

### **1.7.2. Situs Penelitian**

Penelitian ini berjudul Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Menanggulangi Sampah TPA Di Cipeucang adalah TPA Cipeucang yang terletak di Jl. Kapling Nambo No.51, Serpong, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310.

### **1.7.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dari penelitian berjudul Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Menanggulangi Sampah TPA Di Cipeucang adalah stakeholder yang terkait dengan pengelolaan sampah di TPA Cipeucang. Stakeholder yang menjadi subjek penelitian meliputi:

Pihak yang mengurus sampah di TPA cipeucang: Kepala Dinas DLH, Sekretaris Dinas DLH, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Seksi Pengurangan

Sampah, Seksi Penanganan Sampah, Seksi Pelayanan Kebersihan

Pihak yang menangani sampah di TPA Cipeucang: Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA Cipeucang, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD pengelolaan sampah TPA Cipeucang, Kepala Sub Operasional UPTD pengelolaan sampah TPA cipeucang

Pihak yang menangani sampah dari per kecamatan ke TPA cipeucang: Kepala Camat, Sekretaris Camat

#### **1.7.4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penerlitian ini adalah data kualitatif. Berikut penjelasannya:

##### **- Data Kualitatif**

Data kualitatif adalah data non-numerik atau angka. Informasi ini biasanya mencakup analisis keadaan organisasi saat ini untuk membantu penyelidikan mengidentifikasi masalah. Contoh data kualitatif antara lain data wawancara, data observasi, catatan masalah yang ditemui, dan lain-lain.

#### **1.7.5. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara atau dari hasil observasi secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang mendukung data primer. Dalam penelitian ini diperoleh

dari hasil observasi penulis dan penelitian kepustakaan. Dapat dikatakan data sekunder dapat berasal dari dokumen grafis seperti tabel, catatan, studi lapangan, angket, foto, dan lain-lain.

#### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berjudul Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Menanggulangi Sampah TPA Di Cipeucang adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner: Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang terdiri dari petugas kebersihan di TPA Cipeucang dan masyarakat sekitar TPA Cipeucang. Kuesioner disebarakan secara daring dan diisi oleh responden secara mandiri dengan mengikuti panduan yang telah disediakan.
2. Wawancara: Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara tatap muka dengan petugas kebersihan di TPA Cipeucang, masyarakat sekitar TPA Cipeucang, dan pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Observasi: Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi TPA Cipeucang dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi sampah di TPA Cipeucang. Peneliti melakukan observasi dengan menggunakan panduan observasi yang telah disiapkan sebelumnya.
4. Dokumentasi: Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen terkait kebijakan pemerintah dalam menanggulangi sampah di TPA Cipeucang, seperti laporan kebijakan, peraturan daerah, dan dokumen lainnya.

Dokumen-dokumen ini diperoleh dari sumber-sumber yang telah ditentukan sebelumnya.

### **1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif terjadi pada saat pengumpulan data dan selama jangka waktu setelah pengumpulan data selesai. Selama wawancara, peneliti menganalisis jawaban orang yang diwawancarai. Apabila setelah dilakukan analisis, jawaban-jawaban yang diwawancarai tampak kurang memuaskan, maka peneliti melanjutkan wawancara kembali hingga pada tahap tertentu diperoleh informasi yang dianggap dapat diandalkan. Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu;

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti membuat ringkasan, memilih poin-poin penting, memusatkan perhatian pada isu-isu penting, mencari tema dan pola. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan bila perlu mencari informasi tambahan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain. Namun dalam penelitian kualitatif, teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan informasi. Dengan menampilkan data, lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut dengan tepat.

### 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verfivation*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disampaikan merupakan kesimpulan yang masuk akal.

#### **1.7.8. Kualitas Data**

Kualitas data penelitian Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Menanggulangi Sampah TPA Di Cipeucang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Pertama, validitas data dapat dilihat dari sejauh mana data yang dikumpulkan dapat mengukur variabel yang diinginkan dan sejauh mana data tersebut dapat merepresentasikan populasi yang diteliti. Validitas data dalam penelitian ini dapat terjamin karena data yang dikumpulkan berdasarkan sumber data yang valid, seperti dokumen kebijakan, data statistik, dan hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Cipeucang.